

Implementasi Diplomasi Preventif Indonesia Terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan Pada 1990-2000

Alessandro Kurniawan Ulung*

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia

a.kurniawan.ulung@usni.ac.id

*Email Korespondensi: a.kurniawan.ulung@usni.ac.id

Abstract:

Abstract: This research aims to explain preventive diplomacy carried out by the Indonesian government from 1990 to 2000 to prevent the escalation of conflict in South China Sea. With preventive diplomacy in place, the government sought to facilitate China and Southeast Asian countries, such as Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam and the Philippines, to peacefully solve their territorial dispute in the sea. Therefore, the research question raised by this paper is, "How did Indonesia implement preventive diplomacy from 1990 to 2000 to prevent the conflict from escalating in the region?" Employing a qualitative method and interpretative analysis, the author found that the Indonesian government did preventive diplomacy in a way that the government set up workshops on South China Sea and founded ASEAN Regional Forum (ARF). Indonesia expected the two initiatives to build confidence building measures among the conflicting countries and facilitate the formulation of code of conducts in the South China Sea. The workshops and forum contributed to preventing the escalation of the conflict, thanks to the Indonesian preventive diplomacy in the region.

Keywords: China; Preventive Diplomacy; Indonesian Foreign Policy; South China Sea; ASEAN Regional Forum

Abstrak:

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990 hingga 2000 untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Dengan adanya diplomasi preventif ini, pemerintah berupaya memfasilitasi Tiongkok dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina, untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka di LTS secara damai. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana implementasi diplomasi preventif yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1990 hingga 2000 untuk mewujudkan tujuan tersebut?" Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis interpretatif, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi preventif dengan cara menginisiasi lokakarya tentang LTS dan mendirikan ASEAN Regional Forum (ARF). Indonesia berharap Inisiatif-inisiatif akan mampu membangun rasa saling percaya antar negara-negara yang sedang berkonflik dan memfasilitasi perumusan aturan tata perilaku di Laut Tiongkok Selatan. Lokakarya dan forum ARF tersebut berkontribusi mencegah eskalasi konflik di LTS berkat diplomasi preventif Indonesia di kawasan.

Kata Kunci: Tiongkok, Diplomasi Preventif, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, ASEAN Regional Forum

PENDAHULUAN

Tumpang tindih klaim teritorial antara Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam masih berlangsung di perairan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Persengketaan ini terjadi sejak era Perang Dingin. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikannya. Namun upaya tersebut kemudian gagal karena kuatnya kepentingan politik dan strategis dari beberapa negara, terutama Tiongkok yang ingin mendapatkan kepemilikan penuh atas sebagian besar wilayah LTS. Implikasinya ialah isu ini selalu memanas dari tahun ke tahun terutama sejak era Perang Dingin. Meskipun tidak terlibat di dalam konflik LTS, Indonesia ikut berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan persengketaan tersebut di dalam kebijakan luar negerinya. Meredakan ketegangan yang terjadi sewaktu-waktu di kawasan LTS telah menjadi agenda politik luar negeri Indonesia. Berbagai manuver diplomasi preventif telah dilakukan Indonesia sebagai instrumen untuk meredakan ketegangan dan mencegah perang terbuka di kawasan.

Bagi Tiongkok dan lima negara yang terlibat dalam isu LTS, perairan ini memiliki posisi yang penting dan strategis. LTS tidak hanya memiliki sumber daya minyak yang besar, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur perairan utama ekspedisi laut. Selain itu, LTS juga dikelilingi negara-negara destinasi perdagangan. Sebagai jalur strategis pelayaran, LTS enam kali lebih padat dari pada Terusan Suez dan 17 kali lebih padat dari pada Terusan Panama. Menurut U.S. Geological Survey, LTS memiliki kandungan minyak sebesar 28 miliar barel. Sedangkan menurut Tiongkok, kandungannya jauh lebih besar dari angka itu, yakni 105 hingga 213 miliar barel. Oleh karena itu, Tiongkok, Taiwan dan empat negara di Asia Tenggara saling bertikai untuk menguasai LTS (Darmawan & Mahendra, 2018, p. 80).

Dalam mengklaim LTS, Tiongkok membuat berbagai kebijakan luar negeri, mulai dari menerbitkan peta klaim pada 1947, melakukan reklamasi hingga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang eksplorasi minyak. Tiongkok bahkan membangun infrastruktur dan mengerahkan kekuatan militer di LTS. Tiongkok menggunakan pendekatan historis di balik klaim sepihaknya atas LTS. Tiongkok mengklaim bahwa LTS dan pulau-pulau yang berada di dalamnya merupakan miliknya sejak abad ke 2 SM. Menurut Tiongkok, Tiongkok telah memiliki dan memanfaatkan LTS untuk kepentingan militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sejak era kepemimpinan Kaisar Wu dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Karena merasa sebagai pewaris takhta dinasti Han dan dinasti-dinasti lainnya, Tiongkok merasa berhak mengklaim kepemilikan atas LTS (Darmawan, 2018, p. 14). Bagi Tiongkok, LTS tidak hanya

sekedar jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan Asia Timur, tetapi juga salah satu “laut dekat” yang secara strategis penting bagi keamanan Tiongkok karena LTS berperan sebagai *buffer zone* bagi Tiongkok di wilayah perairannya (Kusumasomantri, 2018, p. 49).

Klaim sepihak Tiongkok atas LTS memicu instabilitas politik dan keamanan di kawasan. Pada 1995, misalnya, Tiongkok menahan kapal Analita yang dinakhodai oleh Kapten Joefel Alipustain dari Filipina. Ketika sedang menyurvei LTS, kapal Analita menemukan empat bangunan oktagonal di Gugusan Karang Mischief. Kapal tersebut kemudian dikepung dan ditahan oleh Tiongkok. Karena itu, penahanan ini dikenal sebagai insiden Gugusan Karang Mischief. Insiden ini memicu protes dari Filipina dan memperburuk hubungan kedua negara (Darmawan, 2018, p. 18). Untuk mencegah eskalasi isu LTS, Indonesia melakukan diplomasi preventif di kawasan. Diplomasi preventif ialah diplomasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan, mencegah perselisihan meningkat menjadi konflik, dan meminimalisasi dampak dari konflik jika konflik terjadi. Diplomasi ini diimplementasikan dalam tiga tahap. Tahap pertama ialah diplomasi dilakukan langsung pada sumber konflik. Tahap kedua ialah diplomasi dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di tengah perselisihan. Tahap ketiga ialah diplomasi dilakukan untuk mencegah eskalasi tindak kekerasan menjadi perang. Ketiga tahap itu bergantung pada situasi yang dihadapi (Tandy et al., 2021, p. 274). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis ialah, “Bagaimana implementasi diplomasi preventif yang dilakukan oleh Indonesia pada 1990 hingga 2000 untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan?”

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Batasan materinya ialah penulis fokus menjelaskan implementasi diplomasi preventif yang dilakukan Indonesia dalam isu LTS. Sedangkan batasan waktu yang dipilih oleh penulis ialah 1990 hingga 2000 karena pada periode itu, Indonesia mulai mengintensifkan peran aktif dalam menciptakan dan menjaga perdamaian di kawasan LTS. Di dalam bab pembahasan, penulis menjelaskan tiga hal. Pertama, penulis menjelaskan kerangka konseptual tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi preventif. Kedua, penulis mendeskripsikan konflik Laut Tiongkok Selatan pada 1990 hingga 2000. Ketiga, penulis menjelaskan implementasi diplomasi preventif yang dilakukan oleh Indonesia pada periode itu.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan diplomasi preventif Indonesia atas isu LTS pada 1990 hingga 2000. Menurut Monique Hennik (2020), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, menjelaskan keyakinan dan



Volume 12, Nomor 1, Bulan 2026

perilaku, mengidentifikasi proses, dan memahami konteks dari pengalaman manusia. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Data yang dianalisis dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer mencakup pernyataan resmi yang disampaikan oleh pemerintah di dalam situs web kementerian dan ditulis di berbagai dokumen resmi seperti laporan dan siaran pres. Sedangkan data sekunder mencakup jurnal, studi pustaka, dan laporan berita di media cetak dan elektronik (Babbie, 2007). Data-data ini dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah penggunaan berbagai metode dan data di dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif atas suatu fenomena (Carter et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) pada 1990 hingga 2000 merupakan implementasi dari prinsip bebas dan aktif kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia melihat bahwa Indonesia perlu menjembatani mediasi antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik LTS sebagai bukti kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Di dalam manuver diplomasinya, pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak memihak pada salah satu kubu sehingga pemerintah berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip bebas dan aktif di dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, di bab pembahasan ini, penulis akan menjelaskan konsep kebijakan luar negeri dan diplomasi preventif sebagai pisau analisis. Setelah itu, penulis membahas dinamika konflik LTS pada 1990 hingga 2000. Penulis kemudian akan menjelaskan diplomasi preventif yang dilakukan Indonesia pada periode tersebut untuk mencegah konflik tersebut mengalami eskalasi.

Hubungan antara Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Preventif

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep utama, yaitu kebijakan luar negeri dan diplomasi. Diplomasi adalah instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Sedangkan kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang dibuat di dalam negeri dan kemudian diarahkan ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di dalam negeri. Kedua konsep ini penting untuk dipahami sebagai fondasi utama dalam memahami diplomasi preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 1990-2000 dalam merespons instabilitas politik dan keamanan yang disebabkan oleh tumpang tindih klaim atas Laut Tiongkok Selatan.

K. J. Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai kebijakan yang dibuat oleh negara atau komunitas politik lainnya dalam interaksinya dengan negara lain dan aktor non-negara di dunia internasional. Kebijakan luar negeri melintasi batas wilayah teritorial suatu negara dan mampu menjangkau lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri dapat diimplementasikan dalam bentuk menjalin hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, dan membentuk aliansi (Hara, 2011, p. 13). Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang dibuat di dalam negeri dan kemudian diarahkan ke luar negeri dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di dalam negeri. Kebijakan luar negeri mengandung tiga elemen, yaitu tujuan, nilai, dan instrumen. Pertama, ada tujuan yang ingin dicapai oleh negara di luar negeri. Kedua, ada nilai di balik tujuan tersebut. Ketiga, ada cara atau instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut (Kegley & Blanton, 2010).

James Rosenau menyebutkan lima kategori kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, yaitu idiosinkratik, peran, pemerintah, masyarakat, dan pengaruh sistemik (Toma & Gorman, 1991, p. 121). Kelima kategori tersebut kemudian dibingkai oleh Peter A. Toma dan Robert F. Gorman ke dalam tiga level analisis, yakni level sistemik (*systemic level*), level atribut nasional (*national attribute level*), dan level idiosinkratik (*idiosyncratic level*). Level sistemik mencakup berbagai pengaruh eksternal yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, seperti berbagai peristiwa internasional, karakteristik struktural sistem global, dan faktor geografis (Toma & Gorman, 1991, p. 121). Level atribut nasional berbicara tentang faktor-faktor internal di dalam negara, seperti kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dukungan masyarakat, dan kondisi demografi (Toma & Gorman, 1991, p. 124). Sedangkan level idiosinkratik mengkaji tentang karakter personal dari pembuat kebijakan di dalam negara, seperti aktif atau pasif, positif atau negatif, toleran atau tidak toleran, rasional atau impulsif, tegas atau ragu, dan sebagainya (Toma & Gorman, 1991, p. 129).

Kebijakan luar negeri mengandung tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah diplomasi. Negara melakukan diplomasi untuk mencapai tujuannya di luar negeri demi mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di dalam negeri. Diplomasi adalah seni berunding atau bernegosiasi. Di dalam manajemen hubungan internasional, negosiasi ini diatur dan dilakukan oleh duta besar dan diplomat sebagai perwakilan suatu negara (Alexandra & Mujiono, 2019, p. 3). Diplomasi merupakan aktivitas damai. Namun, diplomasi juga dapat dilakukan dalam kondisi konflik bersenjata dan bahkan, perang karena tugas utama diplomasi ialah tidak hanya manajemen konflik, tetapi



juga manajemen perubahan. Di dalam diplomasi, pihak-pihak yang bernegosiasi saling melakukan tekanan politik, ekonomi, dan militer untuk mencapai kepentingan nasional (Djelantik, 2008). Kepentingan nasional tersebut ialah kekuasaan. Bagi Hans Morgenthau, kekuasaan merupakan tujuan utama yang ingin diraih oleh setiap negara di dalam hubungan internasional (Oktavianto, 2023, p. 190).

Dalam upaya mencapai tujuan dari kebijakan luar negerinya, negara melakukan diplomasi. Menurut Sir Victor Wellesley, diplomasi merupakan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri. Diplomasi adalah bagian dari politik luar negeri. Politik luar negeri, di satu sisi, menyangkut substansi dari isi hubungan luar negeri. Sedangkan diplomasi, di sisi lain, menyangkut metodologi untuk melaksanakan politik luar negeri. Diplomasi adalah seni berpolitik yang dilakukan oleh perwakilan negara dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya (Suryokusumo, 2004, p. 54).

Diplomasi preventif merupakan diplomasi yang bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak merembet ke wilayah-wilayah lain. Diplomasi preventif berupaya untuk mengurangi ketegangan dan mencapai perdamaian yang kekal. Diplomasi model ini pertama kali diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Boutros-Ghali untuk mencegah, menyelesaikan, dan membendung terjadinya pertikaian antar negara baik yang timbul maupun yang sudah ada agar tidak meningkat ke arah konflik (Suryokusumo, 2004, p. 60).

PBB mendefinisikan diplomasi preventif sebagai tindakan untuk mencegah perselisihan, mencegah berkembangnya perselisihan menjadi konflik, dan mencegah meluasnya perselisihan (Emmers & Seng Tan, 2009, p. 6). Diplomasi preventif dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama ialah diplomasi preventif dilakukan tepat pada sumber konflik agar tidak terjadi perselisihan. Tahap kedua ialah diplomasi preventif dilakukan untuk mencegah berubahnya perselisihan menjadi aksi kekerasan. Tahap ketiga ialah diplomasi preventif dilakukan untuk mencegah perang (Tandy et al., 2021, p. 274).

Boutros-Ghali melihat diplomasi preventif sebagai penggunaan teknik diplomasi untuk mencegah perselisihan. Jika perselisihan terjadi, diplomasi preventif bertujuan untuk mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik bersenjata. Jika konflik bersenjata terjadi, diplomasi preventif bertujuan untuk mencegah penyebaran konflik bersenjata tersebut (Emmers & Seng Tan, 2009, p. 6). Menurut Mohammed Bedjaoui, diplomasi preventif dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pemerintah hingga pengusaha, dari jurnalis hingga organisasi internasional, dan dari bankir hingga lembaga swadaya masyarakat (Cahill, 2000).

Dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan

Pada bagian ini, penulis membahas dua hal. Penulis menjelaskan terlebih dahulu nilai strategis Laut Tiongkok Selatan (LTS). Setelah itu, penulis menjelaskan dinamika konflik yang terjadi di LTS pada masa Perang Dingin. Nilai strategis ini penting untuk dipahami sebagai fondasi untuk memahami mengapa Tiongkok, Taiwan, dan beberapa negara-negara di Asia Tenggara berkepentingan untuk menguasai LTS.

1. Nilai Strategis Laut Tiongkok Selatan

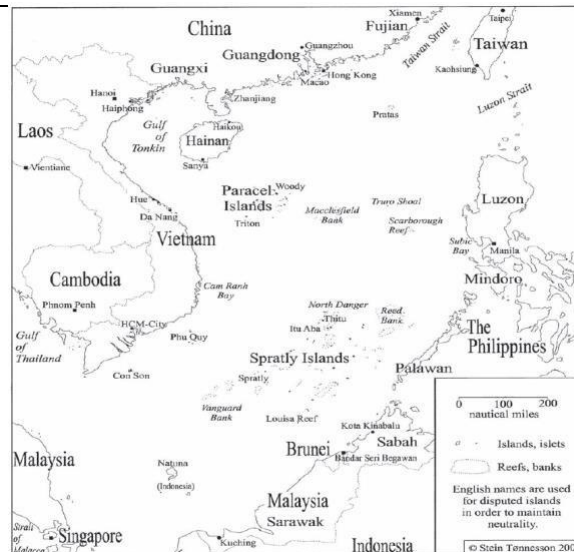
Area perairan LTS memiliki panjang 1.100 kilometer dari Selat Malaka di Barat Daya hingga ke Selat Taiwan di Timur Laut. Posisi LTS yang strategis inilah yang membuat LTS memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi dan kemudian mendorong negara-negara di sekitarnya untuk memilikinya. Posisi geografis dan geopolitik LTS yang strategis mendorong Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim kawasan tersebut (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 45).

Jika ditinjau dari posisi strategisnya, LTS merupakan jalur pelayaran internasional teramai kedua di dunia. Komoditi yang melewati jalur perdagangan LTS memiliki nilai 5,3 triliun dolar setiap tahunnya (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 45). Nilai ekonomi LTS tidak hanya itu saja. LTS menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Misalnya, kandungan minyak di LTS mencapai tujuh milyar barel dan kemampuan produksinya per hari mencapai 2,5 juta barel (Rowan, 2005, p. 417). Selain itu, LTS juga memiliki lima triliun meter kubik gas alam. Sepersepuluh ikan dunia juga hidup di LTS (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 45). Dengan posisi yang strategis dan nilai ekonomi yang tinggi tersebut, tidak mengherankan jika Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei berlomba-lomba berupaya menguasai kawasan LTS. Persaingan di antara mereka menyebabkan konflik teritorial di LTS.

Dari empat gugus kepulauan di LTS, Spratly dan Paracel merupakan gugus pulau yang paling sering disengketakan oleh keenam negara. Spratly dan Paracel memiliki nama-nama yang berbeda di setiap negara. Di Taiwan, misalnya, Kepulauan Spratly dinamakan *Shinnengunto*. Sedangkan di Filipina dan Malaysia, kepulauan itu dinamakan *Kalayaan* dan *Aba*. Tiongkok menyebut Spratly dengan nama Nansha Quadao yang artinya kelompok pulau Pantai Selatan. Kata Spratly sendiri bermakna burung layang-layang (Parandaru, 2024).

Gambar 1. Peta Laut Tiongkok Selatan

Volume 12 | Nomor 1 | Bulan 2026



Sumber: (Tonneson, 2010, p. 29)

2. Dinamika Konflik

Jika ditinjau dari sejarahnya, konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) terjadi sejak abad 20. Namun, konflik semakin memburuk pada 1970-an. Negara-negara yang bersengketa tidak hanya sekedar menuntut, melainkan juga mengibarkan bendera, membangun benteng, mendirikan bangunan dan tanda-tanda, membuat penelitian, dan mengeluarkan undang-undang (Usman & Sukma, 1997, p. 9). Dari negara-negara yang bersengketa, Tiongkok adalah negara pertama yang mengklaim kepemilikan hampir seluruh wilayah TLS. Tiongkok mengklaim LTS pada 1947 (Ruyat, 2017, p. 69). Dalam mengklaim, Tiongkok menggunakan *nine dash line* / sembilan garis putus-putus. Untuk memperkuat klaimnya, Tiongkok kemudian mengeluarkan peta *nine dash line* pada 1993 untuk mengklaim 90 persen dari wilayah perairan LTS (Ruyat, 2017, p. 70). Menurut Tiongkok, Tiongkok berhak mengklaim sebagian besar wilayah LTS karena berdasarkan sejarah Tiongkok, pelaut Tiongkok telah berlayar di sepanjang *nine dash line* sejak abad pertengahan. Klaim Tiongkok tersebut dibantah oleh negara-negara di sekitar LTS. Menurut mereka, Tiongkok tidak berhak membuat klaim tersebut karena berdasarkan sejarahnya, LTS merupakan perairan internasional yang dilalui banyak pelaut dari berbagai bangsa dan negara (Anwar, 2023).

Gambar 2. Tumpang Tindih Klaim Laut Tiongkok Selatan



Sumber: (Kompas, 2023)

Nilai ekonomis dan strategis LTS mendorong negara-negara di sekitar LTS untuk menguasai kawasan ini (Ulung, 2010). Selain dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, kawasan LTS juga dipandang sebagai lokasi yang strategis dan ideal untuk pembangunan pangkalan militer. Oleh karena itu, Tiongkok, misalnya, kemudian membangun dermaga transit di beberapa pulau di LTS untuk angkutan lautnya. Aksi Tiongkok ini kemudian memicu protes keras dari negara-negara lain di sekitar kawasan (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 45). Insiden bersenjata beberapa kali terjadi di LTS. Misalnya ialah insiden bersenjata antara Tiongkok dan Vietnam di Johnson South Reef pada 1988, pendudukan Tiongkok atas Karang Mischief pada 1995, dan baku tembak antara kapal perang milik Filipina dan Tiongkok di dekat Pulau Campones pada 1996 (Parandaru, 2024). Insiden bersenjata ini menunjukkan bahwa konflik di LTS dapat mengalami eskalasi dan berubah menjadi perang terbuka kapan saja. Untuk menjelaskan dinamika konflik di LTS, penulis membuat tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan

Tahun	Konflik
1933	Kawasan Laut Tiongkok Selatan dikuasai oleh Perancis
1939	Kawasan Laut Tiongkok Selatan dikuasai oleh Jepang
1945	- Kawasan Laut Tiongkok Selatan dikuasai oleh sekutu sampai tercapainya Perjanjian Damai San Fransisco - Taiwan menduduki pulau Aba

1970	▪ Filipina mengajukan tuntutan penemuan Cloma
1973	▪ Vietnam Selatan mengirimkan pasukannya ke pulau-pulau Spratly ▪ Vietnam Selatan mengumumkan penggabungan 11 pulau di Kepulauan Spratly dengan Provinsi Phuoc Tuy pada September 1973
1974	▪ Vietnam menduduki Southwest Cay, Sand Cay, Namyit, Sin Cowe, Spratly, dan Amboyna Cay di Kepulauan Spratly ▪ Vietnam mendirikan instalasi militer di lima pulau ▪ Tiongkok menguasai pulau Paracel. ▪ Tiongkok menyusul menduduki pulau Spratly pada Januari 1974 ▪ Filipina menduduki tiga pulau, termasuk Comodore Reef. Pada Februari 1974 Filipina kembali menduduki lima pulau, yaitu Nanshan, Flat, West Rock, Northeast Cay, dan Thitu
1978	▪ Filipina menduduki Lankiam Cay dan Loaita ▪ Presiden Marcos menandatangani Dekrit Presiden untuk menuntut pulau Kalayaan
1979	▪ Malaysia menuntut pulau-pulau yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya, yaitu Swallow Reef, Dallas Reef, dan Mariveles Reef ▪ Brunei menuntut Louisa Reef yang diklaim oleh Malaysia
1982	▪ Filipina membangun instalasi militer di beberapa pulau dan menempatkan pasukan sebanyak 500 orang di pulau terbesar, yaitu Pagasa. Total pasukan Filipina di pulau yang didudukinya berjumlah 1000 orang.
1983	▪ Malaysia untuk pertama kalinya menempatkan pasukannya di Terumbu Layang-Layang

1986	▪ Tiongkok mengirimkan Angkatan Laut dan kemudian mengadakan latihan militer di Laut Tiongkok Selatan. ▪ Sebagai aksi protes, Malaysia menempatkan pasukan di Pulau Matanani dan Ubi pada November 1986
1987	▪ Vietnam menduduki pulau Barque Canada Reef. Vietnam kemudian menduduki empat pulau lainnya ▪ Tiongkok membangun pangkalan tetap yang pertama di Fierry Cross Reef ▪ Tiongkok menduduki beberapa pulau lagi untuk melindungi pangkalan tersebut.
1988	Terjadi bentrok senjata antara Angkatan Laut Tiongkok dan Vietnam pada Maret 1988 Malaysia menangkap 49 awak kapal ikan Filipina karena menangkap ikan di lepas pantai Serawak. Kedua negara mengirimkan pasukan militer di pulau yang diklaimnya.
1989	▪ Tiongkok menduduki Fiery Cross Reef, Cuateron Reef, Gaven Reef, Gac Ma Reef, dan Subi Reef di Kepulauan Spratly. ▪ Vietnam menduduki Amboyna Cay, Owen Shoal, Ladd Reef, Rifleman Bank, Spratly, Central London Reef, Pearson Reef, dan Allison Reef. ▪ Taiwan menduduki Aba ▪ Filipina menduduki Commodore Reef, Pannata, Thitu, North East Cay, Loaita, dan Flat
1990	▪ Angkatan Udara Filipina mengadakan latihan militer di Kepulauan Kalayaan ▪ Tiongkok memperingatkan Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari Pulau Nansha

Sumber: data dalam tabel ini diolah dari Usman, A., & Sukma, R. (1997). Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)., hlm. 9-15.

Diplomasi Preventif Indonesia

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang tak kunjung usai mendorong Indonesia

untuk mengambil peran penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Walaupun Indonesia bukan negara pengklaim, pemerintah Indonesia melihat pentingnya ikut serta dalam menciptakan perdamaian di LTS di dalam kebijakan luar negerinya. Alasannya ialah posisi LTS yang berdekatan dengan wilayah teritorial Indonesia. LTS bersebelahan dengan perairan Indonesia di Natuna (Ruyat, 2017, p. 68). Instabilitas keamanan di LTS dapat mengancam keamanan teritorial Indonesia (Apriwan et al., 2016, p. 138).

Menciptakan perdamaian tidak bermakna sebagai upaya untuk menyelesaikan persengketaan atau menentukan negara manakah yang berhak memiliki kedaulatan penuh atas LTS, melainkan berupaya untuk mencegah agar konflik tidak semakin memanas dan menyebabkan perang terbuka. Hal itu merupakan bentuk implementasi dari prinsip aktif dalam pilar politik luar negeri Indonesia, yakni ikut berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan prinsip bebas memosisikan Indonesia untuk tidak terjebak untuk condong dan memihak ke salah satu kubu dari negara-negara yang bersengketa. Oleh karena itu, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ialah diplomasi preventif, yakni diplomasi yang dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun perdamaian di LTS.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Indonesia dalam diplomasi preventifnya ialah Indonesia menggagas lokakarya (*workshop*) tentang isu LTS. Melalui lokakarya tersebut, Indonesia mengumpulkan negara-negara yang bertikai dan seluruh anggota ASEAN untuk berdialog dan mencari potensi kerja sama di kawasan. Indonesia meyakini bahwa kerja sama di LTS akan mendukung kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan negara yang bersengketa. Kerja sama eksplorasi kawasan, misalnya, tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat politik karena berkontribusi dalam menciptakan hubungan baik dan mengurangi rasa curiga di antara negara-negara yang bertikai. Indonesia meyakini kerja sama di LTS akan menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian di kawasan (Usman & Sukma, 1997, p. 62). Lokakarya tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat potensi konflik dan menjajaki peluang-peluang kerja sama (Usman & Sukma, 1997, p. 63). Duta Besar Indonesia untuk masalah Hukum Laut dan Kelautan, Hasyim Djalal, sebagai penggagas lokakarya tersebut, mengatakan;

“Saat itu, saya mempunyai dua tujuan dasar. Untuk mengelola potensi konflik dengan mencari suatu bidang di mana semua orang dapat bekerja sama. Untuk mengembangkan langkah-langkah atau proses yang membangun kepercayaan sehingga berbagai penggugat dapat menyesuaikan diri satu sama lain, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa wilayah atau yurisdiksi mereka (Djalal, 2000, p. 14).

Apabila kedua tujuan tersebut berhasil dicapai, Indonesia berharap negara-negara yang bertikai akan mampu merumuskan sendiri resolusi konflik seperti apakah yang terbaik bagi mereka sendiri. Tujuan tersebut tercermin dari pernyataan Hasjim Djalal yang mengatakan: “Untuk menciptakan rasa kebersamaan di antara masyarakat dan komunitas di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan yang pada akhirnya dapat mendorong negara-negara untuk menyelesaikan sendiri salah satu permasalahan yang mereka hadapi (Song, 2010, p. 257).”

Untuk menyukseskan pelaksanaan lokakarya tersebut, Indonesia mencari dukungan negara lain, khususnya dari negara-negara yang bertikai. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dari negara di luar ASEAN. Pada waktu itu, Indonesia memilih Kanada untuk membantu Indonesia sebagai fasilitator dalam mempersiapkan lokakarya tersebut. Setelah Indonesia melakukan negosiasi, Kanada bersedia mendukung dan membantu Indonesia dalam memfasilitasi lokakarya demi menciptakan perdamaian di kawasan LTS. Hal itu dibuktikan dengan pembentukan kelompok kerja *Ocean Institute of Canada/ South China Sea Informal Working Group*.

Indonesia berhasil menyelenggarakan lokakarya pertama pada 22-24 Januari 1990 di Bali. Lokakarya ini dinamakan *the Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*. Di dalam pelaksanaan lokakarya, Indonesia hanya mengundang negara anggota ASEAN. Tiongkok, Vietnam dan Taiwan sengaja tidak diundang oleh Indonesia sebagai bagian dari strategi diplomasi preventif. Pada saat itu, Vietnam belum menjadi anggota ASEAN. Indonesia merancang pertemuan tersebut untuk menyatukan persepsi negara anggota ASEAN terlebih dahulu sebelum mereka bernegosiasi dengan Tiongkok, Vietnam dan Taiwan. Selain itu, Tiongkok tidak diundang oleh ASEAN karena Tiongkok berpandangan bahwa permasalahan LTS tidak perlu “diinternasionalisasikan”. Oleh karena itu, menurut Tiongkok, pembahasan tentang upaya merumuskan resolusi konflik lebih baik dilakukan secara bilateral dengan negara yang bersengketa (Djalal & Townsend-Gault, 1999).

Setelah bernegosiasi dengan Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada Januari 1990, Indonesia kembali menggagas lokakarya lanjutan sebagai bagian dari diplomasi preventifnya. Lokakarya kedua diselenggarakan pada 15-18 Juli 1991 di Bandung, Jawa Barat. Indonesia mengundang Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan pada pertemuan kedua ini. Tiongkok bersedia menerima undangan Indonesia untuk menghadiri lokakarya tersebut. Bersedianya Tiongkok untuk hadir merupakan kemajuan di dalam upaya diplomasi preventif Indonesia karena Tiongkok sebelumnya selalu menolak undangan pembahasan sengketa LTS secara multilateral. Selain itu, Tiongkok juga bersedia untuk duduk satu meja dengan Taiwan. Tiongkok masih belum mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara yang merdeka. Diplomasi Indonesia untuk menurunkan potensi konflik semakin terbuka lebar karena lokakarya tersebut

bertujuan merumuskan tata perilaku (*code of conduct*) di LTS. Pertemuan di Bandung ini menghasilkan enam Prinsip Bandung (*Bandung Principles*) yang mereka sepakati sebagai dasar bagi perumusan tata perilaku dan fondasi kerja sama. Keenam prinsip tersebut adalah:

- a. Menjajaki bidang-bidang kerja sama di LTS
Bidang-bidang kerja sama dapat mencakup kerja sama dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan komunikasi, memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata, memanfaatkan sumber daya hayati secara rasional, melindungi dan melestarikan lingkungan laut, melakukan penelitian ilmiah kelautan, dan untuk memberantas perdagangan gelap narkoba di LTS.
- b. Di area di mana terdapat konflik klaim teritorial, negara-negara terkait dapat mempertimbangkan kemungkinan kerja sama yang dapat memberikan keuntungan bersama, termasuk saling bertukar informasi dan melakukan pembangunan bersama.
- c. Harus menggunakan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan setiap sengketa wilayah dan yurisdiksi di LTS.
- d. Tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi.
- e. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan harus menahan diri untuk tidak mempersulit situasi (Djalal, 2001, p. 100).
- f. Menjajaki bidang-bidang kerja sama di LTS
- g. Bidang-bidang kerja sama dapat mencakup kerja sama dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan komunikasi, memerangi pembajakan dan perampokan

Disepakatinya keenam prinsip tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertikai membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai sektor demi mencapai keuntungan bersama. Mereka juga akan memprioritaskan cara-cara damai melalui dialog dan negosiasi jika sengketa kembali memanas. Keenam prinsip tersebut diharapkan mampu mencegah eskalasi konflik di LTS seperti yang diharapkan dan diupayakan oleh Indonesia melalui penyelenggaraan lokakarya sebagai bagian dari diplomasi preventifnya.

Setelah pelaksanaan lokakarya di Bali dan Bandung, lokakarya lanjutan terus diselenggarakan. Lokakarya ketiga, misalnya, diadakan di Yogyakarta pada 28 Juni-2 Juli 1992.

Lokakarya tersebut menghasilkan pembentukan Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group/TWG*) untuk kerja sama di bidang penelitian ilmiah kelautan dan pengkajian sumber daya (Usman & Sukma, 1997, p. 65). Sedangkan pada lokakarya keenam, hasil penelitian TWG dilaporkan kepada seluruh negara peserta. Pada pertemuan ini, pembahasan mengenai pembangunan rasa saling percaya / *Confidence Building Measures* (CBMs) menjadi topik utama (Usman & Sukma, 1997, p. 70). Sepuluh lokakarya diadakan untuk mencegah eskalasi konflik LTS dari 1990 hingga 2000 (Lihat Tabel 2). Pelaksanaan lokakarya tersebut merupakan bentuk kongkret dari implementasi diplomasi preventif Indonesia untuk menciptakan perdamaian di LTS. Indonesia tidak hanya menggagas lokakarya, tetapi juga berpartisipasi di dalam proses negosiasi di dalamnya.

Selama penyelenggaraan lokakarya, negara-negara yang berpartisipasi menyepakati pembentukan lima TWG di lima bidang, yakni penelitian ilmiah kelautan, pengkajian sumber daya, perlindungan lingkungan laut, pelayaran dan komunikasi, dan hukum. Kelima Kelompok Kerja Teknis berhasil menghasilkan program-program kerja sama yang kongkret. TWG untuk penelitian ilmiah kelautan, misalnya, menghasilkan kerja sama dalam keanekaragaman hayati, pengkajian ketinggian air laut dan pemantauan pasang surut air laut dalam konteks perubahan iklim, dan penyusunan pangkalan data LTS. Pembentukan TWG dan program kerja sama yang dihasilkan ini menunjukkan ketertarikan negara-negara yang terlibat di dalam isu LTS untuk saling bekerja sama dalam hal-hal teknis (Djalal, 2001, p. 101).

Tabel 2. Lokarya Laut Tiongkok Selatan

Tahun	Lokakarya	Tempat
1990	1 st SCS Workshop	Bali, Indonesia
1991	2 nd SCS Workshop	Bandung, Indonesia
1992	3 rd SCS Workshop	Yogyakarta, Indonesia
1993	TWG-MSR1	Manila, Filipina
	TWG-MSR2	Surabaya, Indonesia
	TWG-RAI	Jakarta, Indonesia
	4 th SCS Workshop	Surabaya, Indonesia
1994	TWG-MSR3	Singapore
	TWG-MEP1	Hangzhou, China
	5 th SCS Workshop	Bandung, Indonesia
1995	TWG-MSR4	Hanoi, Vietnam
	TWG-NSC1	Jakarta, Indonesia
	TWG-LMI1	Phuket, Thailand
	6 th SCS Workshop	Baliqapan, Indonesia
1996	TWG-NSC2	Bender Seri Begawan, Brunei
	TWG-MSR5	Manila, Cebu, the Philippines
	GDM-RD	Manila, Cebu, the Philippines
	7 th SCS Workshop	Batang, Indonesia
1997	TWG-MEP2	Hainan, China
	TWG-LMI2	Chiang Mai, Thailand
	GDM-MEP1	Phnom Penh, Cambodia
	GDM-ETM1	Singapore
	GDM-HDI1	Kuching, Malaysia
	SCS-ITC	Singapore
	8 th SCS Workshop	Panaji, India
1998	TWG-NSC3	Singapore
	TWG-LMI3	Pataya, Thailand
	TWG-MSR6	Manila, the Philippines
	GDM-HDI2	Singapore
	GDM-MEP2	Manila, the Philippines
	GDM-UNR	Jakarta, Indonesia
	SGIC1	Vientiane, Laos
	9 th SCS Workshop	Jakarta, Indonesia
1999	GDM-SARJAS	Kuala Lumpur, Malaysia
	SGIC2	Bali, Indonesia
	GDM-ELL	Shanghai, China
	TWG-LMI4	Koh Samui, Thailand
	10 th SCS Workshop	Bogor, Indonesia
2000	GDM-HDI3	Bali, Indonesia
	TWG-LMI5	Chia Ien, Thailand

Indonesia melakukan diplomasi preventif tidak hanya dengan menggagas lokakarya, tetapi juga menggagas pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF), forum dialog keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik. ASEAN membentuk ARF untuk membangun rasa saling (CBMs) percaya dan dialog yang konstruktif tentang isu-isu politik dan keamanan di Asia Pasifik, termasuk isu LTS (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 52). Bagi Indonesia, pembangunan CBMs sangat penting karena berbagai konflik bersenjata yang terjadi semasa Perang Dingin berakar dari lemahnya kepercayaan di antara mereka. Menurut Indonesia, pengembangan CBMs akan memudahkan negara-negara yang bersengketa untuk mencegah eskalasi konflik dan merumuskan resolusi konflik di LTS. Pembentukan ARF akan mendorong negara-negara di kawasan untuk saling berdialog dan berkonsultasi secara konstruktif tentang isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan mereka bersama (He, 2009, p. 136). Pembentukan rasa saling percaya, pengimplementasian diplomasi preventif, dan perumusan resolusi konflik adalah tiga agenda penting di dalam kerja sama ARF (Darmawan & Kuncoro, 2019, p. 52).

Pada masa awal pembentukan ARF, isu LTS belum dibahas oleh negara anggota. Alasannya ialah isu tersebut dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan terlalu cepat. ARF menghindari resistensi Tiongkok apabila menjadikan isu tersebut sebagai topik utama di masa awal pembentukannya. ASEAN khawatir CBMs yang menjadi tujuan utama pembentukan ARF gagal terbangun hanya karena ketidaksenangan Tiongkok (Usman & Sukma, 1997, p. 76). Pada pertemuan ARF kedua di Bandar Seri Begawan pada 1 Agustus 1995, negara-negara anggota mulai membahas isu LTS sebagai bagian dari agenda pembahasan isu-isu keamanan regional (Hamidah, 2003, p. 63). Pada pertemuan tersebut, negara-negara yang terlibat konflik, seperti Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, saling berdialog dan bertukar pandangan.

Bagi Indonesia, ASEAN adalah prioritas utama dalam implementasi kebijakan luar negerinya (Jemadu, 2023, p. 52). Oleh karena itu, dalam diplomasi preventifnya terkait isu LTS, Indonesia memanfaatkan ASEAN sebagai platform untuk merangkul Tiongkok. Pada 1993, Indonesia mengundang Tiongkok bergabung ke dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Sebelum ARF, upaya untuk merangkul Tiongkok dilakukan melalui *ASEAN Post Ministerial Conference* (ASEAN PMC). ASEAN mengundang Tiongkok sebagai mitra konsultasi dalam ASEAN PMC pada Juli 1991 di Kuala Lumpur. Pada saat itu, Tiongkok menanggapi undangan tersebut secara positif (He, 2009, p. 36). Setelah menghadiri ASEAN PMC, Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Huaqiu berkata bahwa Tiongkok siap membangun mekanisme dialog

keamanan secara bertahap, baik dalam level bilateral, subregional, maupun regional, untuk memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi isu-isu terkait dan untuk memperkuat rasa saling percaya (He, 2009, p. 36). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok mendukung upaya dialog yang digagas Indonesia untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam menyikapi konflik LTS.

Ketika ARF secara resmi berdiri pada 1994, Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen mendukung keberadaan ARF. Menurut Qichen, ARF dapat menjadi wadah dialog bagi negara-negara Asia Pasifik untuk meningkatkan kepercayaan dan memperluas pemahaman bersama atas isu-isu politik dan keamanan di kawasan (Shirk, 1994, p. 8) Dukungan Qian Qichen atas pembentukan ARF menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia berkontribusi dalam mempersuasi Tiongkok untuk menempuh jalur damai dari pada militeristis dalam menyikapi berbagai isu keamanan, termasuk isu LTS. Kontribusi diplomasi Indonesia dalam mempersuasi Tiongkok mendapatkan apresiasi dari negara-negara Asia Tenggara yang terlibat konflik dengan Tiongkok. Mereka berharap partisipasi Tiongkok di dalam ARF akan mampu mencegah Tiongkok untuk tidak bertindak asertif, seperti mengirimkan personel militer di perairan LTS dan mengklaim beberapa pulau secara sepihak.

SIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan luar negerinya untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS), Indonesia melakukan diplomasi preventif. Diplomasi ini dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, Indonesia menggagas penyelenggaraan lokakarya. Kedua, Indonesia menggagas pembentukan forum dialog keamanan ASEAN Regional Forum (ARF). Melalui penyelenggaraan lokakarya dan pertemuan ARF, Indonesia berupaya untuk mempertemukan negara-negara pengklaim LTS untuk duduk bersama dan membicarakan cara-cara dalam menemukan solusi damai atas isu LTS. Dengan menggunakan diplomasi preventifnya, Indonesia berupaya membangun rasa saling percaya di antara Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam di dalam lokakarya dan pertemuan ARF. Bagi Indonesia, mencegah eskalasi konflik LTS adalah kebijakan luar negeri yang penting karena posisi LTS bersebelahan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. Jika konflik mengalami eskalasi dan menyebabkan perang terbuka, Indonesia akan terkena dampak negatifnya. Keamanan teritorial Indonesia akan ikut terancam jika perang terbuka terjadi LTS. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk menjembatani komunikasi antara negara-

negara pengklaim dan mencari resolusi konflik yang damai di LTS melalui diplomasi preventifnya. Diplomasi preventif ini juga bukti kongkret implementasi prinsip bebas dan aktif Indonesia di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, F., & Mujiono, D. I. K. (2019). *Pengantar Diplomasi: Sejarah, Teori, dan Studi Kasus*. Mulawarman University Press.
- Anwar, L. A. (2023, December 21). *China Peringatkan Filipina soal Salah Perhitungan di Laut China Selatan*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/21/china-peringatkan-filipina-soal-salah-perhitungan-di-laut-china-selatan?open_from=Search_Result_Page
- Apriwan, Irawan, P., & Trisni, S. (2016). Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Laut Tiongkok Selatan). *Andalas Journal of International Studies*, 5(2), 129. <http://www.todday>
- Babbie, E. R. (2007). *The Basics of Social Research*. Thomson Higher Education.
- Cahill, K. (2000). *Preventive Diplomacy: Stopping Wars Before They Start*. Routledge.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., Dicenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Darmawan, A. B. (2018). Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786.13-35>
- Darmawan, A. B., & Kuncoro, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>
- Darmawan, A. B., & Mahendra, Lady. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. *Global Strategis*, 12(1).
- Djalal, H. (2000). South China Sea Island Disputes. *The Raffles Bulletin of Zoology*, 8.
- Djalal, H. (2001). Indonesia and the South China Sea initiative. *Ocean Development and International Law*, 32(2), 97–103. <https://doi.org/10.1080/00908320151100226>
- Djalal, H., & Townsend-Gault, I. (1999). *Preventive Diplomacy: Managing Potential Conflicts in The South China Sea*. United States Institute of Peace Press.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi: Antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Emmers, R., & Seng Tan, S. S. (2009). *The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy: A Failure in Practice* (189).
- Hamidah, H. (2003). *Pengelolaan Potensi Konflik Laut Cina Selatan Melalui Mekanisme Confidence Building Measures (CBMs)*. Universitas Indonesia.
- Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. NUANSA.
- He, K. (2009). *Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic interdependence and China's rise*. Routledge.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
- Jemadu, A. (2023). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
-

-
- Kegley, C. W., & Blanton, S. L. (2010). *World Politics: Trends and Transformation* (2010th-2011 Edition ed.). Cengage Learning.
- Kompas. (2023). *Percikan Api di Laut China Selatan*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/29/percikan-api-di-laut-china-selatan>
- Kusumasomantri, A. R. (2018). Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1). <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.28>
- Oktavianto, F. (2023). Implikasi AUKUS Terhadap Hubungan Ekonomi Australia dan Tiongkok Tahun 2021-2022. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(2), 185–208. <https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i2.55>
- Parandaru, I. (2024). *Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia*. Kompas. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia>
- Rowan, J. P. (2005). The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute. *Asian Survey*, 45(3).
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 5(1).
- Shirk, S. L. (1994). *Chinese Views on Asia-Pacific Regional Security Cooperation* (Vol. 5, Issue 5).
- Song, Y. H. (2010). The South China Sea workshop process and Taiwan's Participation. *Ocean Development and International Law*, 41(3), 253–269. <https://doi.org/10.1080/00908320.2010.499296>
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. STIH IBLAM.
- Tandy, M. N. P., Chen, E. G., Maria, A., Arrumaisha, C. H., Jackson, V. E., & Valerie, B. (2021). Analisis Signifikansi Keterkaitan Geopolitik dalam Pelaksanaan Diplomasi Preventif Indonesia pada Kasus Laut Cina Selatan. *Jurnal Sentris*. <https://doi.org/10.18196/hi.72130>
- Toma, P. A., & Gorman, R. F. (1991). *International Relations : Understanding Global Issues*. Brooks/Cole Pub Co .
- Tonneson, S. (2010). China's Changing Role in The South China Sea: Reflections on a Scholars' Workshop. *Harvard Asia Quarterly*, 12(4).
- Ulung, A. K. (2010). *Terbentuknya Pemahaman Intersubjektif terhadap Kemajuan Cina di Kawasan Asia Pasifik*. Universitas Jember.
- Usman, A., & Sukma, R. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
